

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan desa sebagai unit pemerintahan yang berada di tingkat lokal memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Desa merupakan entitas yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga kemampuan pemerintah desa dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat memiliki dampak besar terhadap kualitas hidup masyarakat desa. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat secara mandiri.

Salah satu aspek yang menjadi fokus dalam peningkatan kapasitas desa adalah pengelolaan keuangan desa. Melalui pengalokasian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), desa diberikan kesempatan untuk mengelola dana tersebut dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana desa diharapkan dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pemberdayaan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal. Akan tetapi, dalam implementasinya, pengelolaan keuangan desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya transparansi, rendahnya akuntabilitas, dan ketidakefisienan dalam penggunaan dana desa.

Berdasarkan Halim (2012), kinerja keuangan pemerintah desa dapat diukur dari sejauh mana kemampuan desa dalam mengelola anggaran secara efisien dan

akuntabel. Evaluasi kinerja keuangan ini sangat penting untuk mengetahui apakah dana desa yang diterima sudah digunakan sesuai dengan rencana dan apakah hasilnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Mahmudi (2016) lebih lanjut menyatakan bahwa pengukuran kinerja keuangan harus melibatkan evaluasi terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dana desa, yang semuanya harus selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa. Mardiasmo (2018) menekankan bahwa akuntabilitas keuangan desa dapat memastikan bahwa dana yang diterima benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, perlu adanya keterbukaan dalam setiap tahap pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dengan transparansi yang baik, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa.

Namun, kenyataannya, banyak desa yang masih menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan. Berdasarkan penelitian Sutopo (2019), beberapa desa kesulitan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah desa yang berlaku. Faktor lain yang memengaruhi rendahnya akuntabilitas keuangan desa adalah rendahnya kapasitas aparatur desa dalam memahami dan melaksanakan prosedur pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, pengawasan yang minim dari masyarakat serta

kurangnya koordinasi dengan lembaga terkait juga menjadi faktor penghambat dalam pencapaian pengelolaan keuangan desa yang baik.

Menurut Fitriani (2020), permasalahan lain yang sering muncul adalah ketidaksesuaian antara rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana desa, keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban, serta kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan dana desa. Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan keuangan desa agar dana yang ada benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan.

Simanjuntak (2017) menekankan bahwa salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja keuangan desa adalah melalui analisis kinerja keuangan. Analisis ini dapat digunakan untuk menilai apakah dana yang digunakan sudah dikelola secara optimal dan apakah hasil yang dicapai sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan melakukan analisis kinerja keuangan secara rutin, pemerintah desa dapat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam pengelolaan dana desa dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan desa juga sangat penting. Supriyono (2019) mengungkapkan bahwa kemampuan aparatur desa dalam memahami dan melaksanakan prosedur pengelolaan keuangan sesuai dengan regulasi yang berlaku sangat mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan desa. Untuk itu, pelatihan berkala bagi perangkat desa menjadi langkah yang krusial untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa.

Riyadi (2020) juga menggarisbawahi bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya dana yang dialokasikan, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan dana tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis kinerja keuangan desa secara berkelanjutan untuk memastikan dana yang ada benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan desa. Dalam konteks ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DESA MATA AIR KECAMATAN KUPANG TENGAH KABUPATEN KUPANG”**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, masalah utama yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan keuangan desa untuk menilai kinerja pemerintah Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Diatas Maka Persoalan Dalam Penelitian Ini Adalah Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang pada Tahun 2021-2023?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Tahun 2021-2023.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan desa, khususnya dalam menganalisis kinerja keuangan desa. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji topik serupa di daerah lain atau pada periode yang berbeda. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi Pemerintah Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk memperbaiki transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana desa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan desa dengan lebih baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai hasil akhirnya, penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik di masa yang akan datang.